

Prospek Hubungan Maritim Indonesia – Malaysia Pasca Kesepakatan Batas Laut 2023

Muhammad Yuan Fauzil

Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

Email: muhammadyuan111@gmail.com

Agussalim Burhanuddin

Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

Email: agus.unhas@gmail.com

Korespondensi penulis: muhammadyuan111@gmail.com

Abstract: *This article discusses the Indonesia-Malaysia maritime boundary agreement reached in 2023. This paper uses a literature review method to analyze the historical and political context that guided the maritime boundary negotiations between the two countries, particularly highlighting the role of diplomacy and foreign policy in reaching the agreement. Furthermore, it explores the legal aspects of the maritime boundary agreement and its impact on territorial claims, sovereignty and natural resource exploration rights. In the context of international relations, the article discusses how the boundary agreement may affect regional dynamics in Southeast Asia, focusing on the roles of Indonesia and Malaysia as key actors in maritime security and economic development in the region. Comparisons with similar issues in the Asia Pacific region provide a broader perspective on the global implications of this agreement. In addition, this article explores the potential for bilateral collaboration in the areas of security, fisheries surveillance and marine disaster management. Sustainable utilization of natural resources and economic development through maritime cooperation are an important focus, with an emphasis on establishing equitable and sustainable exclusive economic zones. By analyzing all these aspects, this article aims to provide a deep insight into the prospects of maritime relations between Indonesia and Malaysia post the 2023 maritime boundary agreement, as well as provide policy recommendations to strengthen the two countries' cooperation in the maritime field.*

Keywords: *maritime boundary, maritime relations, Indo-Malaysia, maritime studies international relations*

Abstrak: Artikel ini membahas terkait kesepakatan batas laut Indonesia-Malaysia yang dicapai pada tahun 2023. Tulisan ini menggunakan metode kajian pustaka dalam menganalisis konteks sejarah dan politik yang memandu negosiasi batas laut antara kedua negara, utamanya menyoroti peran diplomasi dan kebijakan luar negeri dalam mencapai kesepakatan tersebut. Selanjutnya, penelitian ini mengeksplorasi aspek hukum dari kesepakatan batas laut dan dampaknya terhadap klaim wilayah, kedaulatan, dan hak eksplorasi sumber daya alam. Dalam konteks hubungan internasional, artikel ini membahas bagaimana kesepakatan batas laut ini dapat memengaruhi dinamika regional di Asia Tenggara, dengan fokus pada peran Indonesia dan Malaysia sebagai aktor utama dalam keamanan maritim dan pembangunan ekonomi di kawasan tersebut. Perbandingan dengan isu-isu serupa di kawasan Asia Pasifik dapat memberikan perspektif yang lebih luas terkait implikasi global dari kesepakatan ini. Selain itu, artikel ini mengeksplorasi potensi kolaborasi bilateral di bidang keamanan, pengawasan perikanan, dan penanggulangan bencana laut. Pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pembangunan ekonomi melalui kerjasama maritim menjadi fokus penting, dengan penekanan pada pembentukan zona ekonomi eksklusif yang adil dan berkelanjutan. Dengan menganalisis semua aspek ini, artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang prospek hubungan maritim antara Indonesia dan Malaysia pasca kesepakatan batas laut 2023, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat kerjasama kedua negara di bidang maritim.

Kata kunci: batas laut, hubungan maritim, Indo-Malaysia, studi maritim hubungan internasional

PENDAHULUAN

Diskursus mengenai batas laut telah menjadi salah satu isu yang paling menarik di dalam kawasan Asia Tenggara. Sebagai wilayah dengan kondisi geografis yang heterogen (terdiri atas kawasan darat dan laut) yang luas, stabilitas maritim penting untuk menjaga stabilitas Kawasan. Dalam isu batas laut, kondisi antara Indonesia dan Malaysia menjadi penting untuk dibicarakan. Jika melihat fakta geografis, Indonesia dan Malaysia berbatasan laut secara langsung melalui dua wilayah laut yaitu Selat Malaka dan Laut Sulawesi. Kedua negara juga memiliki kepentingan yang berbeda-beda menyangkut teritori perbatasan laut, sehingga tak jarang, sengketa batas laut tidak dapat dihindarkan. Pada tahun 2022, Indonesia dan Malaysia kembali memulai negosiasi untuk menyelesaikan sengketa batas laut di Selat Malaka dan Laut Sulawesi. Dua wilayah ini telah sejak lama menjadi objek negosiasi antara kedua negara, sebagaimana potensi dan kepentingan yang terdapat didalamnya cukup berlimpah dan penting bagi kedua negara. Negosiasi ini berlangsung selama beberapa bulan dan akhirnya mencapai kesepakatan pada bulan Juni 2023. Kesepakatan batas laut atas Laut Sulawesi dan Selat Malaka ini diumumkan oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pada pertemuan bilateral di Putrajaya, pada tanggal 8 Juni 2023 atau bertepatan dengan peringatan Hari Laut Sedunia. Dalam pertemuan tersebut, terungkap pula bahwa upaya negosiasi atas wilayah tersebut sebenarnya telah dilakukan sejak tahun 2005, dan baru dapat terealisasi 18 tahun setelahnya, (Muhammad Samsul Hadi, 2023)

Jika dilihat lebih jauh, Kesepakatan batas laut baru antara Indonesia-Malaysia ini merupakan peristiwa yang penting untuk dikaji lebih mendalam. Sebab, dengan kompleksitas sejarah dan dinamika hubungan kedua negara dalam sektor maritim, kesepakatan ini bisa memberi implikasi pada hubungan Indonesia – Malaysi dan kawasan Asia Tenggara di masa mendatang.

Perselisihan mengenai batas laut antara Indonesia dan Malaysia sudah terjadi sejak lama. Pada tahun 1969, kedua negara menandatangani perjanjian batas laut untuk pertama kalinya atas wilayah teritori Laut Sulawesi. Kesepakatan ini memuat garis batas antara perairan kedua negara di sekitar Selat Malaka dan Selat Karimata. Garis batas ini penting karena menetapkan wilayah perairan yang dimiliki oleh masing-masing negara untuk kepentingan ekonomi, keamanan, dan regulasi perikanan. (Indonesia, 2010) Akan tetapi, landasan awal kesepakatan maritim kedua negara ini tidaklah berjalan sesuai dengan harapan, akibat adanya penolakan oleh kelompok nelayan yang ada di wilayah Sulawesi Utara. Setelah kesepakatan pertama yang berakhir antiklimaks, Indonesia dan Malaysia tercatat telah kembali

menandatangani perjanjian batas laut di Selat Malaka, tetapi perjanjian tersebut juga mendapat penolakan dari masyarakat Malaysia karena dianggap merugikan kepentingan negaranya.

Kesepakatan batas laut Indonesia-Malaysia yang ditandatangani pada 8 Juni 2023 merupakan peristiwa bersejarah yang membuka babak baru dalam hubungan maritim kedua negara. Kesepakatan ini mengakhiri sengketa maritim yang telah berlangsung selama 18 tahun dan menciptakan kepastian hukum bagi kedua negara dalam memanfaatkan kepentingan nasionalnya dalam bidang maritim. Kesepakatan batas laut ini memiliki sejumlah implikasi penting bagi hubungan maritim Indo-Malaysia. Pertama, kesepakatan ini akan meningkatkan kepercayaan dan kerja sama kedua negara dalam hal keamanan maritim. (Setyorini, 2023)

Perjanjian atau kesepakatan batas laut antara negara-negara menjadi hal yang penting dalam menentukan kedaulatan wilayah, hak-hak sumber daya alam, dan kepentingan strategis. Kesepakatan perbatasan laut menjadi fokus utama dalam hubungan bilateral antara negara-negara, terutama di kawasan Asia Tenggara yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki jalur perdagangan laut yang vital. Salah satu perjanjian batas laut yang menjadi sorotan dalam konteks regional adalah kesepakatan batas laut antara Indonesia dan Malaysia yang ditetapkan pada tahun 2023. Kesepakatan ini mengatur batas-batas wilayah maritim di Laut Sulawesi dan Selat Malaka, wilayah yang memiliki nilai strategis yang tinggi bagi kedua negara. Hal ini menjadi penanda penting dalam sejarah kedua negara yang memiliki wilayah maritim yang berdampingan.

Pembahasan mengenai perjanjian ini memunculkan berbagai aspek, seperti penentuan garis batas yang adil dan merujuk pada hukum internasional, implikasi ekonomi, keamanan, dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah-wilayah yang terlibat. Penelitian dan analisis mendalam terkait implementasi serta dampak dari kesepakatan batas laut Indonesia - Malaysia 2023 atas Laut Sulawesi dan Selat Malaka menjadi hal yang krusial bagi pemahaman akan dinamika hubungan bilateral kedua negara.

Kesepakatan batas laut yang dilakukan oleh kedua negara ini merupakan perwujudan dari proses panjang dalam delimitasi batas maritim diantara kedua negara. Delimitasi batas maritim, merupakan penentuan batas wilayah atau kekuasaan antara satu negara dengan negara lain (tetangganya) di laut. Upaya melakukan delimitasi batas maritim telah menjadi usaha Indonesia selama bertahun-tahun, utamanya pasca ditetapkannya United Nations Convention on Law of The Sea.

Yang penting untuk menjadi perhatian adalah bagaimana implikasi dan prospek hubungan maritim antara Indonesia dan Malaysia setelah kesepakatan delimitasi ini tercapai. Di satu sisi, momen ini diharapkan dapat membawa dampak signifikan terhadap dinamika bilateral di kawasan maritim, memperkuat kerjasama, serta membuka peluang baru dalam

pemanfaatan sumber daya laut. Akan tetapi, di sisi lain ada banyak tantangan yang sedang dihadapi oleh kedua negara di dalam Kawasan Asia Tenggara. Dua wilayah yang menjadi objek kesepakatan juga memiliki dinamika yang panjang.

Laut Sulawesi adalah bagian penting dari samudera di wilayah Asia Tenggara. Terletak di antara Kalimantan, Sulawesi, dan Kepulauan Sulu, Laut Sulawesi dikenal dengan keindahan alam bawah lautnya yang luar biasa. Wilayah ini juga merupakan rumah bagi sumber daya yang melimpah, utamanya di bidang perikanan. Di wilayah ini, hidup beragam spesies ikan, dan kehidupan laut lainnya. Hubungan Indonesia-Malaysia terkait dengan Laut Sulawesi memiliki beragam aspek. Indonesia dan Malaysia telah melakukan beberapa kesepakatan terkait delimitasi batas wilayah laut, namun terkadang masih muncul ketegangan terkait klaim wilayah tertentu di Laut Sulawesi. Di samping itu, keduanya juga terlibat dalam kerja sama ekonomi, terutama dalam pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan.

Sementara itu, Selat Malaka adalah wilayah perairan yang juga menjadi objek kesepakatan batas laut Indonesia Malaysia di tahun 2023. Wilayah ini dikenal sebagai jalur perairan yang strategis yang memisahkan Pulau Sumatera di Indonesia dari Semenanjung Malaysia dan bagian barat Pulau Sumatera. Sebagai salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia, Selat Malaka memiliki pentingnya dalam perdagangan maritim global. Jalur ini memiliki panjang sekitar 805 kilometer dan lebarnya bervariasi antara 2 hingga 25 kilometer. Wilayah Selat Malaka memiliki potensi ekonomi yang besar. Kepadatan lalu lintas kapal-kapal internasional di selat ini mendukung aktivitas perdagangan dunia, dengan sebagian besar perdagangan minyak, barang elektronik, dan bahan mentah lainnya melintasi jalur ini.

Hubungan Indonesia-Malaysia terkait dengan Selat Malaka memiliki sejarah yang kompleks. Kedua negara telah berusaha untuk memperkuat kerjasama dalam mengelola keamanan maritim di selat ini, terutama dalam upaya pencegahan tindak kejahatan seperti penyelundupan, perompakan, dan kejahatan lintas negara lainnya. Meskipun ada kerjasama yang terjalin, terkadang terdapat ketegangan terkait klaim wilayah dan kepentingan yang bersaing di sekitar Selat Malaka.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 mengatur peraturan hukum yang berlaku di lautan internasional. UNCLOS mengatur perbedaan antara batas wilayah negara pantai dan negara kepulauan. Batas laut teritorial negara memiliki jarak 12 mil, zona tambahan 24 mil, dan zona ekonomi eksklusif 200 mil yang diukur dari garis pangkal (*base line*). Batas wilayah negara kepulauan terdiri dari garis yang menghubungkan titik-titik tegak lurus dari pulau-pulau terluar atau titik-titik terluar negara tersebut, sedangkan batas wilayah negara pantai merupakan garis sejajar lekuk-lekuk pantai. (Yusnita, 2018) Pengukuran jarak dilakukan saat air surut. Indonesia adalah salah satu contoh

negara kepulauan, sedangkan Malaysia adalah negara pantai. Penerapan UNCLOS 1982 menimbulkan masalah karena kedua negara berdekatan, menyebabkan tumpang tindihnya area wilayah laut antara kedua negara. Masih terdapat sengketa batas wilayah laut antara Indonesia-Malaysia yang belum terselesaikan hingga saat ini, menyangkut hak eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan sumberdaya hayati maupun non-hayati, dan yurisdiksi negara. Oleh karena itu, diperlukan solusi penyelesaian yang menguntungkan bagi kedua negara. Artikel ini membahas bagaimana alternatif penyelesaian sengketa wilayah laut Indonesia-Malaysia dengan mempertimbangkan konsep negara dan dasar yuridis Indonesia sebagai negara kepulauan, serta mekanisme penyelesaian sengketa internasional. (Bakhtiar, 2015)

Analisis menunjukkan bahwa kesepakatan batas laut 2023 memiliki potensi untuk meningkatkan kerja sama maritim Indo-Malaysia di berbagai bidang. Kerja sama maritim yang lebih erat akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan keamanan maritim, dan melindungi lingkungan laut. Namun, ada juga beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk mewujudkan potensi kerja sama maritim Indo-Malaysia. Tantangan-tantangan tersebut antara lain perbedaan kepentingan kedua negara, serta keterbatasan sumber daya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena secara mendalam, dengan mengumpulkan berbagai data untuk diolah menjadi generalisasi. (Margono, 2010) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dan menyeluruh, serta mendeskripsikan fenomena tersebut secara alamiah. Data diperoleh dari studi literatur, yaitu dengan mengumpulkan data terkait penelitian dari sumber-sumber sekunder seperti buku, dokumen, artikel online, media, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan kasus yang diangkat. Dalam hal ini, data yang digunakan adalah mengenai dinamika dalam negosiasi Indonesia – Malaysia hingga tercapainya kesepakatan batas laut 2023. Sumber yang didapatkan akan lebih banyak diambil dari media online mengingat kerangka isu yang dibahas masih sangat baru dan belum banyak kajian empiris yang ditemukan setelah kesepakatan batas laut Indonesia – Malaysia dilaksanakan.

Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif mengenai implikasi ekonomi, pertahanan, dan stabilitas regional pasca kesepakatan disetujui. Metode analisis ini dipilih dikarenakan penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, atau kejadian saat ini untuk dianalisis kemungkinan di masa mendatang.

Dengan demikian, data yang diperoleh dari berbagai sumber mengenai Kesepakatan batas laut Indonesia - Malaysia selanjutnya akan dideskripsikan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Kesepakatan batas laut Indonesia-Malaysia di Laut Sulawesi dan Selat Malaka merupakan sebuah peristiwa penting yang telah lama dinantikan oleh kedua negara. Kesepakatan ini merupakan hasil dari perundingan yang berlangsung selama 18 tahun, dan telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada tanggal 8 Juni 2023 di Kuala Lumpur. Penetapan batas laut ini merupakan hasil dari perundingan yang melibatkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan klaim wilayah laut yang bersinggungan di antara mereka.

Hukum Laut Internasional menjadi landasan utama bagi kesepakatan batas laut antara Indonesia dan Malaysia, dengan merujuk pada prinsip-prinsip UNCLOS 1982. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dalam menetapkan batas wilayah laut yang sah di antara kedua negara. Proses negosiasi dan diplomasi yang terlibat dalam kesepakatan batas laut antara kedua negara menunjukkan upaya untuk menyelesaikan konflik wilayah dengan damai. Hal ini mencerminkan niat baik kedua belah pihak untuk mempertimbangkan kepentingan masing-masing tanpa merusak hubungan bilateral secara keseluruhan. Konsep wilayah negara memberikan prinsip non-intervensi dalam persoalan yang mencakup yurisdiksi domestik dan prinsip untuk menghormati integritas wilayah negara lain. (Kusumo, 2013)

Pembagian wilayah laut juga berdampak pada pengelolaan sumber daya alam di area tersebut, seperti hasil laut, potensi perikanan, dan sumber daya tambang. Kesepakatan batas laut memungkinkan kedua negara untuk mengelola sumber daya tersebut secara lebih efisien dan adil. Kesepakatan perbatasan laut juga memungkinkan Indonesia dan Malaysia untuk meningkatkan kerja sama dalam ketahanan maritim, mencakup aspek keamanan perairan, pencegahan kejahatan lintas batas di laut, serta koordinasi antara angkatan laut kedua negara. Salah satu contoh konkrit dari kerjasama tersebut telah dibuktikan dengan adanya sinergitas trilateral INDOMALPHI (Indonesia, Malaysia, Philippines) yang dijalankan oleh tiga negara dalam rangka perlindungan Laut Sulawesi dan Sulu dari ancaman kejahatan transnasional. (Sitompul, 2021) Dampak ekonomi dan sosial dari kesepakatan batas laut juga signifikan bagi kedua negara. Penetapan yang jelas mengenai wilayah laut menciptakan stabilitas yang mendukung kegiatan perdagangan laut, pelayaran, dan investasi di sektor kelautan, yang pada gilirannya dapat memajukan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di kedua negara.

Penyelesaian sengketa perbatasan laut juga dapat memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia. Kesepakatan ini dapat menjadi landasan untuk meningkatkan kerja sama dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, keamanan, dan budaya. Kesepakatan ini merupakan sebuah kemenangan bagi Indonesia dalam hal kedaulatan maritim. Indonesia berhasil mempertahankan wilayah laut teritorialnya di Laut Sulawesi dan Selat Malaka. Kesepakatan ini juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki komitmen untuk menyelesaikan sengketa perbatasan dengan negara tetangga secara damai dan adil.

Dalam perspektif regional dan global, kesepakatan batas laut antara Indonesia dan Malaysia memiliki implikasi yang luas. Hal ini dapat memengaruhi dinamika geopolitik di kawasan Asia Tenggara dan memberikan contoh penting dalam penyelesaian konflik wilayah di seluruh dunia. Kesepakatan batas laut antara kedua negara mencerminkan pentingnya negosiasi yang damai, keterbukaan untuk solusi yang saling menguntungkan, serta penghargaan terhadap hukum internasional dalam menangani klaim wilayah. Kesepakatan ini juga menjadi model bagi negara-negara lain dalam menyelesaikan sengketa perbatasan dan menekankan pentingnya kerja sama bilateral yang saling menguntungkan dalam konteks hubungan internasional. Berdasarkan kesepakatan ini, batas laut teritorial Indonesia dan Malaysia di Laut Sulawesi ditentukan oleh garis lurus yang menghubungkan titik-titik berikut, Batas laut teritorial ini memiliki panjang total sekitar 110 kilometer, dan sebagian besar wilayahnya berada di perairan Indonesia. Batas laut teritorial ini memiliki panjang total sekitar 50 kilometer, dan sebagian besar wilayahnya berada di perairan Indonesia.

A. Implikasi Kesepakatan Batas Laut Indonesia – Malaysia

1. Meningkatkan stabilitas keamanan dan hubungan bilateral

Dalam paradigma negara yang ciri geografis maritim yang besar, keamanan maritim adalah kunci dalam mempertahankan kedaulatan negara. Perspektif ini juga berlaku pada bagaimana Indonesia dan Malaysia memandang dua objek kesepakatan delimitasi batas laut tahun 2023, yaitu Selat Malaka dan Laut Sulawesi. Dua wilayah ini merupakan pintu masuk dari berbagai ancaman pertahanan dan keamanan yang semakin terdiversifikas akibat dari globalisasi. Salah satu ancaman terbesar bagi wilayah laut Asia Tenggara adalah meningkatnya Terorisme menggunakan laut. Sekitar 80% senjata yang digunakan dalam konflik terorisme di wilayah Asia Tenggara, merupakan hasil pasok menggunakan laut. (Prasetyono, 2008) Selain itu, terdapat ancaman lain seperti pengedaran Narkoba dan tinfak perdagangan manusia.

Untuk menanggulangi ancaman-ancaman tersebut secara kolektif, Indonesia-Malaysia sebenarnya telah memiliki banyak bentuk kerjasama dalam bidang keamanan dan pertahanan. Beberapa diantaranya, seperti Maphilind (Malaysia, Philipina, Indonesia) yang telah digagas sejak tahun 1963. Beberapa bentuk konkrit dari kerjasama ini adalah patrol

bersama dan pertukaran informasi terkait ancaman yang ada di wilayah perairan tiga negara. Akan tetapi, dinamika hubungan maritim Indonesia dan Malaysia selalu menjadi kunci dalam efektivitas kerjasama pertahanan tersebut. Dan dengan adanya kerjasama baru yang disepakati oleh Indonesia-Malaysia, masa depan stabilitas keamanan wilayah bisa lebih baik.

2. Membuka peluang kerja sama ekonomi

Kesepakatan batas laut selain menjadi momentum penguatan hubungan bilateral di antara kedua negara, tapi tentunya juga memberikan kepastian hukum bagi kedua negara dalam mengelola sumber daya alam di wilayah tersebut. Ini membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih baik, seperti eksplorasi sumber daya laut, pengembangan infrastruktur maritim, dan perdagangan di sektor kelautan.

Saat ini, Indonesia sedang mengupayakan terwujudnya ekosistem *blue economy* yang berbasis pada kekayaan maritim yang melimpah. Ide ekonomi biru merujuk pada penggunaan sumber daya laut yang berkelanjutan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan lapangan kerja. Konsep ini menyoroti keterkaitan antara berbagai sektor dalam penggunaan sumber daya laut serta menyerukan pendekatan manajemen yang terintegrasi, termasuk pengaturan wilayah laut untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan sektor, konsultasi melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan peningkatan pengumpulan data. Penghitungan nilai ekonomi dari sumber daya alam serta pembiayaan yang bersifat berkelanjutan juga menjadi fokus dalam konsep ini. (Nasution, 2022) Kerangka ini tentu telah melihat potensi yang dimiliki oleh kapasitas maritim wilayah Indonesia. Dari segi potensi keseluruhan ikan laut yang dapat dipertahankan, sekitar 7,5 persen (6,4 juta ton/tahun) dari keseluruhan potensi global berlokasi di wilayah perairan Indonesia. Tidak hanya itu, hampir 24 juta hektar area perairan dangkal di Indonesia cocok untuk dikembangkan sebagai tempat budidaya laut, seperti ikan kerapu, kakap, baronang, kerang mutiara, teripang, rumput laut, dan spesies laut lainnya yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dengan potensi produksi sekitar 47 juta ton/tahun/Lebih lanjut, Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman hayati laut yang tertinggi di dunia baik dari segi genetika, spesies, maupun ekosistemnya.

Dalam konteks objek kesepakatan Indonesia-Malaysia, dua wilayah laut tersebut juga termasuk bisa mendorong penciptaan iklim *blue economy*. Selat Malaka sejak lama telah dikenal sebagai wilayah perairan internasional yang penting dalam lalu lintas perdagangan dunia. Selain dikenal sebagai sebuah jalur laut internasional, Selat Malaka juga dianggap sebagai pusat utama perdagangan global. Bukti nyata adalah adanya 60.000 hingga 94.000 kapal yang melewati Selat Malaka setiap tahun. Dalam jumlah tersebut, sebagian besar kapal mengangkut sekitar 25% dari total barang dagangan dunia, 2/3 dari total Gas Alam Cair (LNG) dunia, 14% dari kebutuhan harian dunia, dan sekitar 11 juta barel minyak setiap harinya.

(Verdinand Robertua, 2019) Ana Lopez dalam *Interntional Straits* mengatakan bahwa Wilayah selat internasional adalah area perairan alami yang berfungsi sebagai jalur lintasan, memiliki lebar yang tidak melebihi dua kali dari lebar laut teritorial yang dimiliki oleh negara pantai yang berdekatan. Selat internasional ini bertindak sebagai pemisah antara dua wilayah daratan dan menghubungkan satu laut terbuka milik suatu negara pantai dengan laut terbuka yang dimiliki oleh negara lain, atau menghubungkan antara Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) suatu negara dengan ZEE negara lain, juga memungkinkan menghubungkan laut teritorial dari negara lain jika kondisinya memungkinkan. Selat internasional ini berperan sebagai penghubung bagi perairan dalam suatu kepulauan yang digunakan untuk jalur pelayaran internasional.

Dengan adanya kesepakatan batas laut yang disetujui, maka potensi perekonomian atas selat Malaka bisa lebih terjamin, dengan adanya kepastian regulasi. Dari segi potensi pendapatan yang bisa digarap oleh kedua negara, hasil riset yang dilakukan otoritas Indonesia menemukan terdapat sekitar 30 Miliar Dolar AS yang berada di wilayah Selat Malaka. (Kassa, 2022) Bentuk kerjasama yang bisa dieksplorasi kedua negara adalah pembentukan jaringan tol laut di wilayah *Sea Lane Of Transportation* (SLOT) Selat Malaka. Selain itu, pengembangan lain yang membutuhkan kolaborasi antara kedua negara tentunya penguatan budaya Bahari yang sebenarnya antar dua negara tersebut memiliki irisan yang cukup identic.

3. Meningkatkan perlindungan lingkungan laut

Kesepakatan ini juga akan membantu meningkatkan perlindungan lingkungan laut di kawasan. Kedua negara akan bekerja sama dalam pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, serta penanggulangan pencemaran laut. Secara keseluruhan, kesepakatan batas laut Indonesia-Malaysia ini merupakan sebuah peristiwa penting yang akan membawa manfaat bagi kedua negara. Kesepakatan ini akan meningkatkan stabilitas keamanan, memperkuat hubungan bilateral, dan membuka peluang kerja sama ekonomi dan perlindungan lingkungan laut. Kesepakatan ini akan membuka peluang kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Malaysia di bidang kelautan. Kedua negara dapat bekerja sama dalam eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya laut, serta pembangunan infrastruktur maritim. Kerja sama ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kedua negara. Kesepakatan ini akan membantu meningkatkan perlindungan lingkungan laut di kawasan. Kedua negara akan bekerja sama dalam pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, serta penanggulangan pencemaran laut. Kerja sama ini akan menjaga kelestarian lingkungan laut dan menjamin ketersediaan sumber daya laut untuk generasi mendatang,

Sehingga secara keseluruhan, kesepakatan batas laut Indonesia-Malaysia ini merupakan sebuah peristiwa penting yang akan membawa manfaat bagi kedua negara dan kawasan secara keseluruhan

KESIMPULAN

Kesepakatan batas laut antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 2023 telah menjadi titik penting dalam dinamika hubungan maritim kedua negara. Artikel ini menganalisis sejarah, perjalanan diplomasi, implikasi hukum, serta dampak politik, ekonomi, dan lingkungan yang melibatkan kesepakatan tersebut. Diskusi ini menggambarkan bahwa kesepakatan batas laut ini menandai penyelesaian sengketa yang telah berlangsung selama 18 tahun, menandai babak baru dalam kerja sama maritim antara Indonesia dan Malaysia. Kesepakatan ini merupakan bukti kesuksesan diplomasi antara kedua negara, memperlihatkan komitmen mereka dalam menyelesaikan sengketa perbatasan secara damai dan mengikuti prinsip-prinsip UNCLOS 1982. Batas laut yang ditetapkan memberikan kejelasan dan kepastian hukum, memungkinkan peningkatan kerja sama dalam berbagai sektor, seperti ekonomi, keamanan, dan lingkungan.

Implikasi dari kesepakatan batas laut antara Indonesia dan Malaysia merupakan hal yang signifikan dalam berbagai aspek. Kesepakatan ini tidak hanya mencakup peningkatan stabilitas keamanan dan hubungan bilateral antar kedua negara, tetapi juga membuka peluang kerja sama ekonomi yang luas di sektor kelautan. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kedua negara. Selain itu, kesepakatan ini juga berdampak positif pada perlindungan lingkungan laut dengan memperkuat pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan serta upaya penanggulangan pencemaran laut. Kesepakatan ini menandai era baru dalam kerjasama kedua negara dalam bidang maritim yang diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kawasan dan masyarakat di sekitarnya, serta perlindungan lingkungan laut. Namun, masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti perbedaan kepentingan kedua negara dan masalah sumber daya. Meskipun begitu, kesepakatan ini menjadi contoh penting dalam penyelesaian konflik wilayah di kawasan Asia Tenggara, menunjukkan pentingnya negosiasi damai dalam konteks hubungan internasional. Dengan penetapan batas laut yang jelas dan mendukung, Indonesia dan Malaysia memiliki potensi untuk meningkatkan kerja sama maritim yang berkelanjutan. Keberhasilan kesepakatan ini menjadi model bagi negara-negara lain dalam menyelesaikan sengketa perbatasan dan menekankan pentingnya kerja sama bilateral yang saling menguntungkan dalam konteks hubungan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachri, S., & Siahainenia, A. M. (2020). "The Fisheries Management Policy in The Sulawesi Sea: A Perspective." *Journal of Applied Environmental and Biological Sciences*, 10(6), 79-84.
- Bakhtiar, A. I., 2015. Penyelesaian Sengketa Antara Indonesia dan Malaysia di Wilayah Ambalat Menurut Hukum Laut Internasional. *Brawijaya Student Law Journal*, II(1), pp. 1-23.
- Indonesia, K. P. R., 2010. Konsep Penetapan Batas ZEE Indonesia Malaysia di Laut China Selatan. [Online] Available at: https://www.kemhan.go.id/strahan/wp-content/uploads/migrasi/Produk/zee_lcs.pdf [Accessed 5 December 2023].
- Kassa, N. N., 2022. Potensi Pendapatan di Selat Malaka Capai US\$30 Miliar, Ini Target Pelindo. [Online] Available at: <https://sulawesi.bisnis.com/read/20221218/540/1609382/potensi-pendapatan-di-selat-malaka-capai-us30-miliar-ini-target-pelindo> [Accessed 1 December 2023].
- Kusumo, A. T. S., 2013. Alternatif Penyelesaian Sengketa Wilayah Laut. *Yustisia*, 2(1), pp. 103-112.
- Margono, 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta..
- Muhammad Samsul Hadi, M. K. N. S., 2023. Indonesia-Malaysia Sepakati Batas Laut Setelah Berunding 18 Tahun. [Online] Available at: <https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/06/09/indonesia-malaysia-sepakati-batas-laut-setelah-berunding-18-tahun> [Accessed 3 December 2023].
- Nasution, M., 2022. Potensi dan Tantangan Blue Economy Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Budget*, 7(2), pp. 340-363.
- Prasetyono, E., 2008. *Energy Security: an Indonesian Perspective..* 1 ed. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Setyorini, V., 2023. Kemlu Malaysia jelaskan traktat batas laut terbaru Indonesia-Malaysia. [Online] Available at: <https://www.antaranews.com/berita/3598860/kemlu-malaysia-jelaskan-traktat-batas-laut-terbaru-indonesia-malaysia> [Accessed 3 December 2023].
- Sitompul, A. B. R., 2021. Efektivitas Kerjasama INDOMALPHI Terhadap Keamanan di Perairan Indonesia. *JOM FISIP*, 8(2), pp. 1-17.
- Verdinand Robertua, E. M. W. B. L. K., 2019. SPECIAL ZONE FOR SHIP WASHING IN TRANSBOUNDARY MARINE POLLUTION REDUCTION AT MALAKA STRAIT. *Sociae Polites*, 20(2), pp. 115-126.
- Yusnita, U., 2018. Penyelesaian Sengketa Batas Laut Antara Indonesia dan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Binamulia Hukum*, 7(1), pp. 96-106.